



KABUPATEN
PESISIR SELATAN

RENJA

R e n c a n a K e r j a

TAHUN 2021

**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Jenderal Sudirman, Painan Telp. (0756) 7464131, Fax. (0756) 7464085

**PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR: 08 TAHUN 2020

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dirasa perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Bapedalitbang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Bapedalitbang Adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 2005-2025 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu (1) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyajian Rencana Kerja Bapedalitbang Tahun 2021, meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Bapedalitbang Tahun Lalu ;
 - c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Bapedalitbang;
 - d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Bapedalitbang
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Rencana Kerja Bapedalitbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala Bapedalitbang ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Bapedalitbang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Januari 2020

Kepala Bapedalitbang
Kabupaten Pesisir Selatan



YOZKI WANDRI.S.PI,M.Si.

NP 19750101 200003 1 003

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian, shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, beserta sahabat kerabat dan kita sekalian pengikut sampai akhir zaman. Alhamdulillah Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2021.

Rencana kerja (Renja) Bapedalitbang tahun 2021 merupakan rangkaian perencanaan program dalam pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, baik anggaran pembangunan maupun rutin serta sumber sumber lainnya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan juga mengacu kepada prioritas pembangunan daerah, Rencana strategis dan program pembangunan dalam Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016- 2021 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 , Peraturan Perundangan serta Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Sangatlah disadari bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan tahun 2020 ini masih belum sempurna, serta masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada kami. Namun demikian, diharapkan Rencana Kerja (Renja) ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipergunakan sesuai dengan harapan.

Sago, 31 Januari 2020

Kepala Bapedalitbang



Yozki Wandri, S.Pi, M.Si
Nip. 19750101 200003 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPEDALITBANG TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	II-4
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	II-5
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-7
2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.....	II-12
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang	III-1
3.1 Program Dan Kegiatan.....	III-3
BAB IV PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja Bapedalitbang (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, OPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - OPD).

Rencana Kerja OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra OPD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan OPD. Bapedalitbang menyusun guna menyusun rencana kerja yang berupa program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan. Dengan begitu baik program maupun kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bapedalitbang dapat terintegrasi dan terlaksana dengan baik nantinya.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan tetap berpedoman kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan harus mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, dalam melayani kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Bapedalitbang dituntut untuk mampu membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyusunan Renja-OPD Tahun 2021 ini merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2021 merupakan rencana tahunan yang memuat rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar terwujud sinergisitas antar dokumen perencanaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor ... Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;

34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2020 dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapedalitbang tahun 2021. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Bapedalitbang Tahun 2021, meliputi :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya

Bab III Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bapedalitbang

Berisikan rumsan dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2021 dan perkiraan maju Tahun 2021.

Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BAPEDALITBANG TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana kerja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau apa yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020.

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi saat ini
- b. Sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- c. Tujuan yang dikehendaki dalam menyelesaikan permasalahannya;
- d. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- e. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 juga memperhatikan hal– hal sebagai berikut :

- a Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan kerja tahun anggaran 2021;
- b Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian target Renstra SKPD s/d tahun sebelumnya (tahun 2020) dapat dilihat pada tabel II.1 berikut:

Tabel. II.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Sebelumnya
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	12
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaaan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaaan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
4	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	100%	0	1	1	100	1	1	100	
5	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	100%	0%	1	1	100	1	1	100	
6	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	100%	0	0	0	0	0	0	-	
V	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan pembangunan siosial budaya yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
2	Koordinasi Aksi PPK	terlaksananya koordinasi aksi pencegahan korupsi	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
3	Penyusunan materplan Pendidikan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	100%	0	0	0	0	1	1	100	
4	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	tersusunya startegi dan kebijakan penangulngankemiskinan	100%	0	0	0	0	0	0	-	
5	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	100%	0	0	0	0	0	0	-	
VI	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian pada tahun akhir Renstra 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2016 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran kegiatan SKPD Tahun 2016 (Tahun lalu/n-2)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD Tahun berjalan 2017 (n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2017 (tahun berjalan /n-1)		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6) *100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100	12
3	Pemetaan dan Rencana Induk Penataan Kawasan Rawan Bencana	Tersedianya database kawasan rawan bencana	0%	0	0	0	0	0	0	-	
VII	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah	Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	100	
1	Koordinasi Program PAMSIMAS	terkoordinasikannya program PMSIMAS	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	60	
2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	terkoordinasikannya program AMPL dan PPSP	100%	40%	50 persen	50 persen	100	60 persen	60%	60	
VIII	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanjuti	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	100	5 kerjasama	5 kerjasama	100	
1	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan dengan Pihak Ketiga	terkoordinasikannya kerjasama pembangunan dengan pihak ketiga	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	5 kerjasama	100	5 kerjasama	5 kerjasama	100	
IX	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	3 dokumen	3 dokumen	100	
1	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Tersusunya laporan LKPJ kepala daerah	1	1	1	1	100	1	1	100	
2	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	1	1	1	1	100	1	1	100	
3	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	1	1	1	100	1	1	100	
X	Program Pengembangan Data dan Informasi	Tingkat integrasi data pembangunan	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi updating data sektoral	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	tersosialisasikannya program-program pembangunan	100%	75%	80%	80%	100	85%	85%	85	
3	Penyediaan Data Statistik Daerah	tersedianya data statistik daerah	100%	1	1	1	100	1	1	100	
4	Penyusunan Profil Daerah	tersusunya profil daerah	100%	1	1	1	100	1	1	100	
XI	Program Perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA	Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	95%	80%	85%	85%	100	90%	90%	95	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Tujuan dari pelayanan OPD Bapedalitbang adalah capaian program pembangunan daerah dengan indikator kinerja persentase indikator kinerja utama daerah yang memiliki capaian diatas 90 % dari jumlah IKU di RPJMD, terdapat yang IKUnya diatas 90 % dan kinerjanya dibawah 90%. Artinya secara umum fungsi Bapedalitbang dalam mengawal RPJMD dapat diwujudkan.

Dari tujuan tersebut ada empat sasaran strategis Bapedalitbang

1. Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan dengan indikator kinerja persentase keselarasan sasaran Renstra dengan RPJMD.

Dari evaluasi SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Reformasi Birokrasi terhadap 5 komponen SAKIP yaitu :

- a. Perencanaan kinerja
- b. Pengukuran kinerja
- c. Pelaporan kinerja
- d. Evaluasi kinerja
- e. Capaian kinerja

Capaian dari perencanaan kinerja mendapat skor 73 artinya sudah mendapat skor BB. Dengan demikian berarti sebagian besar OPD di Pesisir Selatan perencanaannya sudah selaras dengan RPJMD. Akan tetapi masih ada beberapa OPD yang terus memaksakan perencanaan yang disusun dalam rangka memenuhi struktur yang ada. Hal ini adalah faktor yang harus dicermati untuk dirubah pada tahun berikutnya.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis spasial yang berkualitas dengan indikator kinerja persentase perencanaan berbasis spasial

Dalam rangka meningkatkan kualitas dokumen perencanaan salah satu faktor penting adalah mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis spasial pada setiap perangkat daerah. Sehingga program program pembangunan yang dilaksanakan pada setiap OPD dapat dituangkan kedalam peta peta yang memiliki atau yang sudah terstandar. Harapannya seluruh pembangunan yang dilaksanakan baik melalui program APBD maupun investasi tidak berada pada lahan yang saling tumpang tindih. Saat ini sudah ada 10 perangkat daerah yang menuangkan perencanaannya kepada peta yang berstandar.

3. Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dengan indikator kinerja persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang dengan indikator kinerja Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Adapun isu-isu penting di Bapedalitbang dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang koordinasi antar OPD secara horizontal maupun koordinasi Vertikal, dimana setiap tahun Bapedalitbang melaksanakan Sinkronisasi Program dan Rapat Kerja dengan pesertanya Dinas / Instansi Terkait di Kabupaten / Kota dan Propinsi .
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi yaitu :

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan Visi dan pengembangan Misi Bapedalitbang, yaitu sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan.
Sebagai SKPD yang diberi tugas sebagai perencanaan baik anggaran dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung dengan ketersediaan tenaga teknis, Dengan jumlah tenaga teknis sangat terbatas dikaitkan dengan rentang tugas-tugas yang sangat banyak dan padat serta mendesak, sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagai perencana kurang maksimal.
- 2) Jumlah personil belum seimbang dengan beban tugas.
Sebagian tugas yang diberikan tidak seimbang dengan jumlah personil yang ada, oleh sebab itu tugas yang diterima terkadang tidak cepat selesai dengan waktu perencanaan yang telah ditentukan. Dengan keterbatasan jumlah personil maka para personil di tuntut untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas agar tercapai perencanaan yang maksimal



- 3) Masih kurangnya kesempatan aparatur dalam peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Peningkatan sumber daya aparatur harus ditingkatkan agar apaaratur dapat meningkatkan kapasitas kerja dan sumber daya para aparatur demi pencapaian suatu perencanaan yang telah ditentukan.

- 4) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas data yang dibutuhkan untuk perencanaan.

Kualitas data yang dibutuhkan masih kurang akurat atau kurang bagus dari data yang akan dipergunakan dalam melakukan perencanaan

- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Sarana dan prasarana yang tersedia ditempat kerja belum tersedia secara memadai dan masih kurang. Dalam pelaksanaan kerja sarana dan prasana yang dibutuhkan haruslah lengkap agar perencanaan tercapai dengan maksimal

- 6) Masih kurangnya koordinasi antar bidang dan instansi terkait.

Dalam pelaksanaan perencanaan tersebut koordinasi antar bidang dengan instansi- instansi yang terkait masih kurang. Dengan kurangnya koordinasi antara instansi yang terkait maka pelaksanaan perencanaan tersebut tidak berjalan memadai.

c. Dampak

Keterbatasan dalam memaksimalkan hasil yang akan dicapai.


d. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan

Memaksimalkan hasil yang akan dicapai dengan tupoksi, kekuatan dan kewenangan yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Pesisir Selatan.

e. Isu-Isu penting dalam penyelenggaraan tugas pada Bapedalitbang yaitu :

1. Optimalisasi pola koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta monitoring dan evaluasi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan.
2. Optimalisasi sistem pendataan/informasi/data
3. Pemantapan peran Bapedalitbang sebagai motivator, koordinator, komunikator serta administrator suatu perencanaan
4. Peningkatan jumlah dan kualitas aparat perencana dalam mendukung pelaksanaan tugas.



- 
5. Penyusunan SOP dan SPM
 6. Perencanaan Pembangunan tepat guna berbasis IPTEK

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun perbandingan antara RKPD 2020 dengan rancangan awal usulan RKPD Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sesuai tabel berikut:

Tabel. II.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Pesisir Selatan

RANACANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
1	2		3			2		3			12
I.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	1.011.499.582	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan dievaluasi	6 dokumen	1.011.499.582	
1	Penyusunan Rancangan RKPD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen RKPD	1	64.692.260	Penyusunan Rancangan RKPD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen RKPD	1	64.692.260	
2	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya musrenbang RKPD	100%	174.872.452	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya musrenbang RKPD	100%	174.872.452	
3	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020	Pesisir Selatan	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	-	-	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2016-2020	Pesisir Selatan	Tersusunnya RPJMD kab Pessel 2016-2021	-	-	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	terkelolanya e-planning	100%	105.254.870	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pesisir Selatan	terkelolanya e-planning	100%	105.254.870	
5	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	Pesisir Selatan	tersusunya renstra SKPD	-	-	Koordinasi dan Asistensi Penyusunan Renstra SKPD	Pesisir Selatan	tersusunya renstra SKPD	-	-	
6	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	-	-	Penyusunan Kajian KLHS RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RPJMD	-	-	
7	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Pesisir Selatan	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	-	-	Penyusunan Rancangan Rencana Strategis SKPD	Pesisir Selatan	Tersusunnya Renstra Bappeda 2016-2021	-	-	
8	Sosialisasi RPJMD	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	-	-	Sosialisasi RPJMD	Pesisir Selatan	tersosialisasikannya RPJMD Kab. Pessel	-	-	
9	Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RTRW	-	-	Penyusunan Kajian KLHS Revisi RTRW	Pesisir Selatan	tersedianya dokumen KLHS RTRW	-	-	

10	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	80.143.000	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS RAPBD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen KUA dan PPAS RAPBD	2	80.143.000
11	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	80.072.000	Penyusunan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen KUA dan PPAS perubahan APBD	2	80.072.000
12	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Pesisir Selatan	Terwujudnya koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	100%	98.921.000	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Pesisir Selatan	Terwujudnya koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah	100%	98.921.000
13	Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten	Pesisir Selatan	Terciptanya fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	100%	125.000.000	Fasilitasi dan Sinkronisasi RPJM Nagari dengan RPJM Kabupaten	Pesisir Selatan	Terciptanya fasilitasi dan sinkronisasi RPJM Nagari dan RPJM Kabupaten	100%	125.000.000
14	Evaluasi RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RKPD	100%	64.810.000	Evaluasi RKPD	Pesisir Selatan	terlaksananya evaluasi RKPD	100%	64.810.000
15	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Pesisir Selatan	Tersusunya laporan LKPj kepala daerah	-	-	Koordinasi Penyusunan Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Pesisir Selatan	Tersusunya laporan LKPj kepala daerah	-	-
16	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Pesisir Selatan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	100%	160.000.000	Monitoring, Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan	Pesisir Selatan	terlaksananya monitoring pelaksanaan rencana pembangunan	100%	160.000.000
17	Penyusunan Perjanjian Kinerja	Pesisir Selatan	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	57.734.000	Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN)	Pesisir Selatan	Tersusunya perjanjian Kinerja	1	57.734.000
II.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	332.750.000	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase perencanaan pembangunan ekonomi yang terkoordinasikan	95%	332.750.000
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	121.000.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	121.000.000
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	121.000.000	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah	95%	121.000.000
3	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaan	95%	90.750.000	Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya rencana percepatan pembangunan kawasan perdesaan	95%	90.750.000
4	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	Pesisir Selatan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	1	-	Penyusunan Kajian Peningkatan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Pangan	Pesisir Selatan	tersedianya kajian tentang pengembangan pangan daerah	1	-
5	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	1	-	Penyusunan Ranperda Pengembangan BUMD Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	tersusunya perda BUMD kepariwisataan	1	-
6	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	1	-	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan	1	-
III.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	95%	181.500.000	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		Persentase perencanaan pembangunan sosial budaya yang terkoordinasikan	95%	181.500.000

1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	181.500.000	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang ekonomi	95%	181.500.000
2	Koordinasi Aksi PPK	Pesisir Selatan	terlaksananaya koordinasi aksi pencegahan korupsi	-	-	Koordinasi Aksi PPK	Pesisir Selatan	terlaksananaya koordinasi aksi pencegahan korupsi	-	-
3	Penyusunan materplan Pendidikan	Pesisir Selatan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	1	-	Penyusunan materplan Pendidikan	Pesisir Selatan	tersedianya data base kependidikan dan masterplan pendidikan	1	-
4	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya startegi dan kebijakan penangulangankemiskinan	1	-	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Pesisir Selatan	tersusunya startegi dan kebijakan penangulangankemiskinan	1	-
5	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	Pesisir Selatan	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0	-	Penyusunan RAD Implementasi ABS-SBK	Pesisir Selatan	tersusunya rencana aksi daerah implementasi ABS-SBK	0	-
IV.	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	100%	406.341.930	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan SDA		Persentase perencanaan pembangunan prasarana wilayah yang terkoordinasikan	100%	406.341.930
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	100%	101.169.300	Koordinasi Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	Pesisir Selatan	terlaksananya koordinasi perencanaan bidang prasarana wilayah	100%	101.169.300
2	Koordinasi Program IPDMIP Kab.Pessel	Pesisir Selatan	Terciptanya sinergisitas intansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	100%	201.738.200	Koordinasi Program IPDMIP Kab.Pessel	Pesisir Selatan	Terciptanya sinergisitas intansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi	100%	201.738.200
3	Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup	Pesisir Selatan	Tersedianya database kawaan rawan bencana	100%	103.434.430	Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup	Pesisir Selatan	Tersedianya database kawaan rawan bencana	100%	103.434.430
V.	Program Perencanaan Pengembangan Kota -Kota Menengah dan Besar		Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	100%	183.914.800	Program Perencanaan Pengembangan Kota -Kota Menengah dan Besar		Persentase perencanaan pengembangan kawasan perkotaan yang terkoordinasikan	100%	183.914.800
1	Koordinasi Program PAMSIMAS	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program PMSIMAS	100%	125.000.000	Koordinasi Program PAMSIMAS	Pesisir Selatan	terkoordinasikannya program PMSIMAS	100%	125.000.000
2	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya program AMPL dan PPSP	100%	58.914.800	Koordinasi Program AMPL dan PPSP	Pesisir Selatan	terkoordinasikanya program AMPL dan PPSP	100%	58.914.800
VI.	Program Kerjasama Pembangunan		Potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanuti	100%	91.000.000	Program Kerjasama Pembangunan		Potensi kerjasama pembangunan yang ditindaklanuti	100%	91.000.000
1	Koordinasi Spasial, Kerjasama wilayah dan perdesaan	Pesisir Selatan	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	91.000.000	Koordinasi Spasial, Kerjasama wilayah dan perdesaan	Pesisir Selatan	Terkendalinya pemanfaatan ruang di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	91.000.000
VII	Program Pengembangan Data dan Informasi		Jumlah dokumen yang disusun yang digunakan untuk data base perencanaan	2 dokumen	184.300.000	Program Pengembangan Data dan Informasi		Jumlah dokumen yang disusun yang digunakan untuk data base perencanaan	2 dokumen	184.300.000
1	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terselenggaranya forum data Kab. Pessel dalam penyusunan data base pembangunan daerah	1 dokumen	62.300.000	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Pesisir Selatan	Terselenggaranya forum data Kab. Pessel dalam penyusunan data base pembangunan daerah	1 dokumen	62.300.000

2	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	tersosialisasikanya program-program pembangunan	90%	62.000.000	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	Pesisir Selatan	tersosialisasikanya program-program pembangunan	90%	62.000.000	
3	Penyediaan Data Statistik Daerah	Pesisir Selatan	tersedianya data statistik daerah	-	-	Penyediaan Data Statistik Daerah	Pesisir Selatan	tersedianya data statistik daerah	-	-	
4	Penyusunan Profil Daerah	Pesisir Selatan	tersusunnya profil daerah	1 dokumen	60.000.000	Penyusunan Profil Daerah	Pesisir Selatan	tersusunnya profil daerah	1 dokumen	60.000.000	
VIII.	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	2 dokumen	150.000.000	Program Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	2 dokumen	150.000.000	
1	Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 dokumen	100.000.000	Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen inovasi daerah	1 dokumen	100.000.000	
2	Penerapan Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah inovasi yang diterapkan daerah	1 dokumen	50.000.000	Penerapan Inovasi Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah inovasi yang diterapkan daerah	1 dokumen	50.000.000	
IX.	Program Peningkatan Kelembagaan dan sumberdaya Kelitbangan	Pesisir Selatan	Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi/Lembaga Penelitian	2 kerjasama	50.000.000	Program Peningkatan Kelembagaan dan sumberdaya Kelitbangan	Pesisir Selatan	Persentase kerjasama yang dilaksanakan antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi/Lembaga Penelitian	2 kerjasama	50.000.000	
1	Penguatan Kerjasama Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	2 kerjasama	50.000.000	Penguatan Kerjasama Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan	2 kerjasama	50.000.000	
X.	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK	Pesisir Selatan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	25%	500.000.000	Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan SDM dan IPTEK	Pesisir Selatan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	25%	500.000.000	
1	Kajian Kebijakan Pusat dan Daerah di Kab. Pessel	Pesisir Selatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	300.000.000	Kajian Kebijakan Pusat dan Daerah di Kab. Pessel	Pesisir Selatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	1 dokumen	300.000.000	
2	Perencanaan Bidang Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	150.000.000	Perencanaan Bidang Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	150.000.000	
3	Koordinasi Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	1 laporan	50.000.000	Koordinasi Kelitbangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi	1 laporan	50.000.000	
XI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah SDM perencana yang berkompentensi	50	225.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah SDM perencana yang berkompentensi	50	225.000.000	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	15	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan SDM aparatur bappeda	15	75.000.000	
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pesse	50	150.000.000	Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Daerah	Pesisir Selatan	terlaksananya peningkatan kapasitas aparatu perencana lingkup pemda kab pesse	50	150.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Dari Masyarakat

Tabel. II.3
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Pesisir Selatan

Nama OPD : Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 tidak melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung yang menjadi program dan kegiatan yang ada pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Untuk mencapai sasaran yang telah dirumuskan dalam arahan kebijakan pembangunan nasional, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Dalam rancangan awal RKPD tersebut arah kebijakan pembangunan difokuskan pada (1) penuntasan capaian RPJMD tahun 2016-2021 yang belum tercapai, (2) Pencapaian sasaran pokok pembangunan berdasarkan RPJPD tahun 2005-2020 pada tahapan ke-4 dan (3) mendukung cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Bapedalitbang

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dengan menetapkan indikator-indikator keberhasilan dan hambatan yang dijadikan sebagai pengukur kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. Adapun tujuan dari Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan yaitu :


1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan diseluruh bidang Pembangunan.
2. Menciptakan Perencanaan yang aplikatif, terintegrasi antar berbagai program dan mejamin keberlanjutan usaha perekonomian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
3. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam melahirkan dokumen-dokumen Perencanaan yang sesuai kebutuhan sebagai wujud dari perencanaan partisipatif.

4. Menciptakan sistim koordinasi yang lancar dengan instansi terkait dan stakeholders dalam rangka menginventarisasi permasalahan untuk melahirkan konsep pembangunan yang mantap.

B. Sasaran

Sasaran atau objektives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran yang ingin dicapai Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Terlaksana dan terkoordinirnya Rancangan Pemerintah Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Terbantunya Bupati dalam merumuskan kebijaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Tersusunnya Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang (RPJP), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk menentukan arah pembangunan daerah.
4. Tersusunnya Rencana dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 
5. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mengakomodir kebutuhan masyarakat (*bottom up*) sebagai aplikasi dari perencanaan partisipatif
 6. Tekoordinirnya perencanaan Dinas, Badan, Kantor, dan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintahan daerah, instansi vertikal dan kecamatan yang berada di daerah kabupaten Pesisir Selatan.

3.3. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang masih berpedoman pada Renstra Bapedalitbang 2016-2021, selain itu juga mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilaksanakan pada kegiatan tahun yang sudah berlalu dan sasaran RPJPD tahapan ke-4. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan serta rencana tahun depan dan Prakiraan Maju Rencana. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan Bapedalitbang tahun 2021 serta Prakiraan Maju Rencana tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel III.1 dibawah ini.

**BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPEDALITBANG
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kabupaten Pesisir Selatan**

Kode	urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	PROGRAM PELAYANAN ADM PERKANTORAN				1,321,500,000			
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	ketersediaan layanan pramu kantor	Bapedalitbang	12 bulan	70,000,000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	ketersediaan Air, Listrik dan jasa komunikasi	Bapedalitbang	12 bulan	95,000,000			
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	ketersediaan layanan administrasi keuangan	Bapedalitbang	12 bulan	77,000,000			
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Bapedalitbang	12 bulan	79,500,000			
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	ketersediaan biaya perawatan bagi peralatan kerja	Bapedalitbang	12 bulan	21,000,000			
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	ketersediaan alat tulis	Bapedalitbang	12 bulan	155,000,000			
	Peny. Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	Bapedalitbang	12 bulan	50,000,000			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Bapedalitbang	12 bulan	25,000,000			
	Peny. Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Bapedalitbang	12 bulan	13,000,000			
	Peny. Makanan dan Minuman	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	Bapedalitbang	12 bulan	30,000,000			
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Daerah, Pusat	12 bulan	500,000,000			
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengaman kantor	Bapedalitbang	12 bulan	95,000,000			
	Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Pessel	12 bulan	36,000,000			
	Penunjang Operasional Perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	Kab. Pessel	10 dokumen	75,000,000			
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				755,000,000			
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional dibeli (roda 2)	Kantor Bapedalitbang	3 unit	60,000,000			
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Ketersediaan perlengkapan gedung kantor	Kantor Bapedalitbang	1 paket	90,000,000			
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	jumlah peralatan gedung kantor di beli	Kantor Bapedalitbang	paket	120,000,000			

Kode	urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	Pengadaan Mebeuler	Ketersediaan mebeuler	Kantor Bapedalitbang	1 paket	50,000,000			
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kantor Bapedalitbang	12 bulan	235,000,000			
	Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Opeasional	Kantor Bapedalitbang	12 bulan	200,000,000			
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				-			
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah pakaian dinas yang dibeli	Bapedalitbang	paket	-			
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				200,000,000			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mendapat/ mengikuti pendidikan	Kab. Pessel	orang	50,000,000			
	Bimbingan Teknis Penyusunan perencanaan daerah	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam bidang perencanaan pembangunan daerah	Kab. Pessel	100%	150,000,000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFROMASI				100,000,000			
	Forum Data Kabupaten Pesisir Selatan	Dokumen SIPD/ e-database	Kab. Pessel	1 dokumen	50,000,000			
	Penyusunan Profil Daerah	Buku Profil daerah	Kab. Pessel	1 dokumen	50,000,000			
	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN				75,000,000			
	Koordinasi Spasial, Kerjasama Wilayah dan Perbatasan	Peta Tematik yang dihasilkan	Kab. Pessel	15 peta	75,000,000			
		Dukungan koordinasi spasial, kewilayahan dan keriasama daerah	Kab. Pessel	12 bln				
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				865,000,000			
	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Daftar usulan perencanaan partisipatif hasil musrenbang	Kab. Pessel	3 dokumen	190,000,000			
	Penyusunan Rancangan RKPD	Dokumen RKPD dan RKPD-P	Kab. Pessel	2 dokumen	75,000,000			
		Nota KUPA dan PPAS Perubahan 2021		2 dokumen				
	Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Dukungan koordinasi perencanaan dan penganggaran	Kab. Pessel	12 bulan	100,000,000			
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	operasional aplikasi perencanaan dan monev	Kab. Pessel	12 bulan	100,000,000			
	Monitoring , Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah	laporan triwulan evaluasi RKPD 2021	Kab. Pessel	4 dokumen	100,000,000			
		laporan pelaksanaan DAK dan TP	Kab. Pessel	4 dokumen				
	Penyusunan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2022 -	Ranperda RPJMD 2022 -	Kab. Pessel	1 dokumen	300,000,000			
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA				300,000,000			
	Koordinasi Perencanaan pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah laporan	Kab.Pessel	1 dokumen	150,000,000			
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah	Terlaksananya Koordinasi dengan OPD dan TKPKD serta tersusunnya Dokumen LP2KD	Kab.Pessel	1 dokumen	80,000,000			
	Koordinasi Pemerintahan	Jumlah Laporan	Kab.Pessel	1 dokumen	70,000,000			

Kode	urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH dan SDA				620,000,000			
	Koordinasi Program IDPMIP Kabupaten pesisir Selatan	Jumlah PD pengelola IPDMIP yang terkoordinasi dan terfasilitasi	Kab. Pessel	3 PD	300,000,000			
		Jumlah dokumen PSETK	Kab. Pessel	16 DI				
	Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah	Jumlah PD lingkup perencanaan prasarana wilayah yang dikoordinasi dan difasilitasi	Kab. Pessel	9 PD%	100,000,000			
		Jumlah laporan akhir kegiatan		5 laporan				
		Jumlah rekomendasi/ berita acara		2 rekomendasi				
	Koordinasi Perencanaan SDA dan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan	Kab. Pessel	5 laporan	60,000,000			
	Penunjang Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)	Terfasilitasinya Program PHJD di KSPN Mandeh	Kab. Pessel	1 tahun	100,000,000			
	Penyusunan dokumen perencanaan pengembangan infrastruktur dan wilayah	jumlah dokumen infrastruktur	Kab. Pessel	1 dokumen	60,000,000			
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI				100,000,000			
	Koordinasi perencanaan Pembangunan bidang ekonomi	Jumlah Laporan	Kab. Pessel	1 laporan	100,000,000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH				150,000,000			
	Perumusan dan Penajaman Sistem Inovasi Daerah	jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan inovasi daerah	Kab.Pessel	60 perangkat daerah dan puskesmas	150,000,000			
	PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN SDM DAN IPTEK DAERAH				180,000,000			
	Kajian Kebijakan pusat dan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan	jumlah penelitian terkait dengan permasalahan prioritas daerah	Kab.Pessel	1 dokumen	100,000,000			
	Koordinasi Kelitbangan	Jumlah rekomendasi yng dihasilkan/ ditindaklanjuti	Kab.Pessel	1 laporan	80,000,000			
	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA KELITBANGAN				70,000,000			
	Penguatan Kerjasama Kelitbangan	jumlah kerjasama penelitian terkait prioritas daerah	Kab. Pessel	1	70,000,000			
		Jumlah rekomendasi yang dihasilkan oleh Dewan Riset Daerah		4				
Total					4,736,500,000			


 31 Januari 2020
 Kepala Bapedalitbang

 RIZKI WANDRI, S.Pi, M.Si
 NIP. 19750101 200003 1 003

**BAB V
PENUTUP**

Rencana kerja Bapedalitbang (Renja OPD) sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak dari para pelaku pelaku (stakeholder) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tuntutan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar benar dikedepankan.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan yang terukur berdasarkan sasaran – sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapedalitbang Tahun 2016 – 2021. Selain itu Program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Guna mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas perencanaan maka perlu melakukan peningkatan terhadap kapasitas Sumber Daya Aparatur perencanaan dalam melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) kabupaten Pesisir Selatan disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2021. Dengan Rencana Kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab karyawan/karyawati Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Sago, 31 Januari 2020
Kepala Bapedalitbang



Yozki Wandri, S.Pi, M.Si
Nip. 19750101 200003 1 003